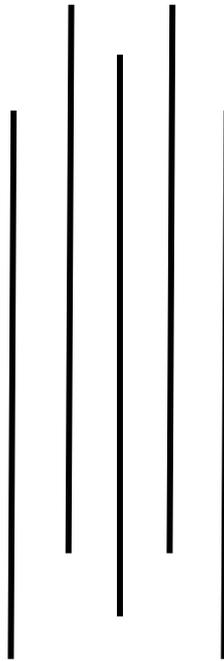




PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(LKIP – SKPD)
TAHUN 2024



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

Jl. H. A. Iskandar Unru No. 2 Telp/Fax 0427-21280 Barru 90711

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
EXECUTIVE SUMMARY	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Sumber Daya.....	7
D. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9
E. Landasan Hukum	21
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	24
B. Perjanjian Kinerja.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	45
B. Realisasi Anggaran.....	63
BAB IV PENUTUP.....	65
LAMPIRAN	

EXECUTIVE SUMMARY

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) merupakan komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan dan mempertanggunggugatkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata dalam menjamin berlangsungnya tugas-tugas pemerintahan secara efisien dan efektif. Sistem pertanggungjawaban tersebut dikenal sebagai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dimulai dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta dilakukan evaluasi atas LKIP tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Barru diwajibkan untuk membuat suatu laporan yang menggambarkan tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan kinerja sasaran serta program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026, Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dan Renja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024 dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024, kemudian dituangkan kedalam LKIP Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024.

Secarake seluruhan, LKIP ini menyajikan dan mengungkap pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Poin	97,778 Poin	97,78%
2	Terwujudnya Pengembangan Daerah yang Visioner	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100%	100%	100%

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024, Bappelitbangda Kabupaten Barru menyediakan anggaran sebesar Rp.3.992.376.733 dan terealisasi sebesar Rp.3.691.941.887 dengan capaian 92,47%. Rencana dan Realisasi anggaran Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
BELANJA	3.992.376.733	3.691.941.887	300.434.846	92,47%
BELANJA OPERASI	3.854.376.733	3.582.141.887	272.234.846	92,94%
Belanja Pegawai	2.499.737.701	2.326.911.244	172.826.457	93,09%
Belanja Barang dan Jasa	1.354.639.032	1.255.230.643	99.408.389	92,66%
BELANJA MODAL	138.000.000	109.800.000	28.200.000	79,57%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.000.000	109.800.000	28.200.000	79,57%

Sumber Data: Laporan Akhir Tahun Bappelitbangda Tahun 2024

Melalui LKIP tahun 2024 sebagai tahun kedua pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026, diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan kebijakan dan program Bappelitbangda pada Renstra tahun 2021-2026 sesuai dengan tujuan, sasaran serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Barru sebagai sebuah instansi pemerintah berkewajiban untuk mengumpulkan dan menganalisis capaian kerjanya. Selanjutnya informasi kinerja tersebut dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara baik. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan dari pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, tujuannya adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kerjanya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

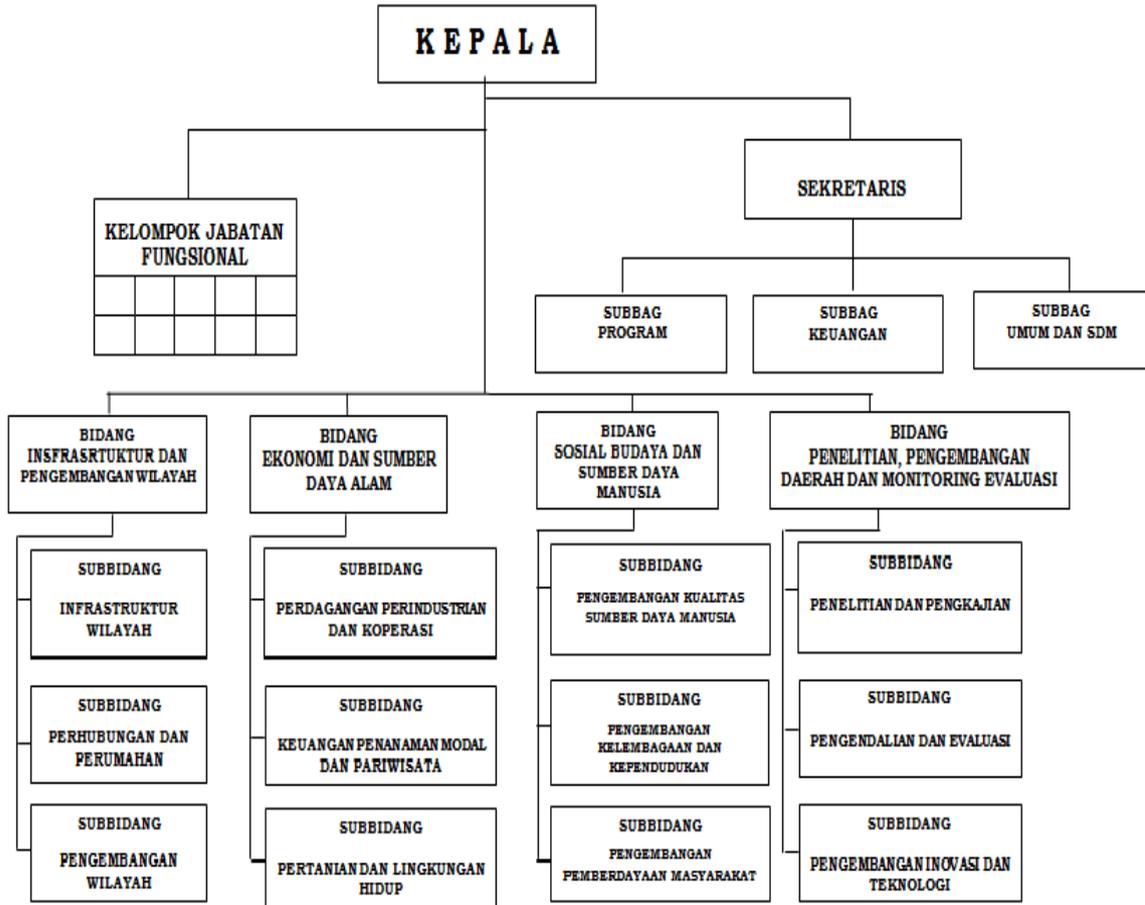
Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. Sementara fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok. Adapun struktur organisasi untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme). Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappelitbangda Kabupaten Barru diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru.

Bappelitbangda merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dan kelitbang daerah yang menjadi kewenangan daerah. Bappelitbangda dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Bappelitbangda Kabupaten Barru terdiri atas:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Program

- b) Subbagian Keuangan
- c) Subbagian Umum dan Sumber Daya Manusia
- 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.
Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Barru



Uraian tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan

pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta penelitian dan pengembangan daerah;
- b) pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta penelitian dan pengembangan daerah;
- c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta penelitian dan pengembangan daerah;
- d) perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan program, keuangan, umum dan sumber daya manusia, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris melaksanakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas bidang program, keuangan, umum dan sumber daya manusia;
- b) pemberian dukungan pelaksanaan tugas bidang program, keuangan, umum dan sumber daya manusia;
- c) monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang program, keuangan, umum dan sumber daya manusia;

- d) koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan; dan
- e) pelaporan tugas administrasi di lingkungan Badan.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi:

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b) pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c) pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu kepala badan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- b) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pembangunan manusia;

- c) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengembangan kualitas sumber daya manusia; dan
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
- b) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang sumber daya alam;
- c) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang infrastruktur;
- d) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengembangan wilayah; dan
- e) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengkajian;
- b) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengembangan daerah;
- c) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pengembangan inovasi dan teknologi; dan
- d) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

7. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sumber Daya

Sumberdaya Bappelitbangda Kabupaten Barru dapat dilihat dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sarana dan prasarana yang ada.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Barru, jumlah sumber daya manusia yang tersedia adalah sebanyak 26 orang, terdiri atas 9 (sembilan) pejabat struktural, 7 (tujuh) fungsional perencana, 2 (dua) fungsional peneliti, 1 (satu) pranata komputer dan 7 (tujuh) fungsional umum. Rincian ASN Bappelitbangda Kabupaten Barru sampai dengan Desember 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Sumber Daya Manusia Bappelitbangda Kabupaten Barru Berdasarkan Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Golongan dan Diklat Struktural/Non Struktural Tahun 2024

NO	NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN				GOLONGAN				DIKLAT STRUKTURAL/NON STRUKTURAL				
		ISI	KOSONG	SLTA	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	PRAJAB / LATSAR
1	Kepala Badan	1				1					1		1			
2	Sekretaris	1			1						1			1		
3	Kepala Subbagian Program	1			1					1					1	
4	Kepala Subbagian Umum dan Sumber Daya Manusia	1			1					1					1	
5	Kepala Subbagian Keuangan	1			1					1					1	
6	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1				1					1				1	
7	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1					1				1				1	
8	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	1				1				1					1	
9	Kepala Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	1				1				1					1	
10	Fungsional Perencana	7			4	3				7					7	
11	Fungsional Peneliti	2			2					2					1	1
12	Fungsional Pranata Komputer	1			1					1						1
13	Fungsional Umum	7		2	4	1			2	4	1				1	6
	TOTAL	26	0	2	15	8	1	0	2	19	5	0	1	1	16	8

Sumber Data : Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2024

Sarana dan prasarana Bappelitbangda Kabupaten Barru dalam bentuk ASET TETAP yang ada sampai Desember 2024 dengan perincian seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Aset Tetap Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

NO	ASET TETAP	JUMLAH	HARGA (Rp)
1	Alat Angkutan	7 Unit	470.125.000
2	Alat bengkel dan alat ukur	3 Unit	18.000.000
3	Alat kantor dan Rumah tangga	180 Unit	737.596.679
4	Alatstudio, komunikasi dan pemancar	6 Unit	39.818.949
5	Komputer	46 Unit	385.575.780
6	Bangunan gedung	1 Unit	4.672.416.783
7	Jaringan	2 Unit	21.100.000
8	Bahan perpustakaan	2506 Unit	5.213.515.672
	JUMLAH	2751 Unit	11.558.148.863

Sumber Data : Inventarisasi Aset Bappelitbangda Tahun 2024

D. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappelitbangda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bappelitbangda dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bappelitbangda dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya yang merupakan unsur penunjang di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan, optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan yang bersinergi dari Nasional, Provinsi dan Daerah. Terkait hal tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Barru memiliki fungsi strategis dalam proses pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai. Adapun Identifikasi masalah berdasarkan sebagai berikut:

Tabel. 3.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bappelitbangda Kabupaten Barru

Urusan	Permasalahan	Penanggungjawab
Perencanaan	Belum Optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan	Kepala Bappelitbangda Kabupaten Barru
	Koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran SKPD belum optimal	
	Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi belum sinergi, masive dan sistematis	
	Monitoring dan evaluasi yang belum optimal	
	Koordinasi dalam upaya penataan peraturan masing kurang sinergi dengan OPD utama	
Penelitian dan Pengembangan	Fungsi kelitbangdan belum optimal	
	Kurangnya hasil penelitian dan pengembangan pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengembangan daerah	
	Kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi yang menjadi penting, untuk menunjang aktivitas kinerja dalam penyusunan dokumen hasil-hasil penelitian yang lebih terarah dan terukur	
	Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah.	

Sumber Data : Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

Berdasarkan analisis permasalahan yang diperoleh dari perencanaan, penelitian dan pengembangan kabupaten barru, serta dinamika peraturan perundang-undangan dan dinamika pembangunan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam proses perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah yang dihadapi Bappelitbangda kabupaten Barru, yang antara lain :

Tabel 4.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketersediaan data yang belum akurat	Ketersediaan Data akurat yang kurang memadai	Lemahnya dalam menganalisis data Perbedaan data dan Informasi
2.	Koordinasi yang belum optimal	Belum optimalnya koordinasi internal	Analisis Perencanaan belum optimal dalam mengarahkan pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah.
3.	Monitoring dan Evaluasi belum optimal	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan belum optimal	Ketersediaan analisa dan rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capain kinerja belum ada.
4.	Pemanfaatan hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah belum optimal.	Pelaksanaan penelitian belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah.	Kualitas dan kuantitas SDM dan fasilitas pendukung belum memadai.
5.	Pemanfaatan Inovasi daerah belum optimal	Pelaksanaan Inovasi daerah belum optimal	Pendampingan dan evaluasi dari keberlanjutan Inovasi belum optimal.

Sumber Data : Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. Proses telaahan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappelitbangda yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barru sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barru. Visi pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 adalah :

“Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Barru diatas adalah sebagai berikut :

Sejahtera adalah Kondisi dimana masyarakat Barru hidup makmur dan sejahtera baik secara ekonomo maupun sosial.

Mandiri adalah Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan Kabupaten Barru

Berkeadilan adalah Kondisi ideal dimana Dampak Pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal di belakang.

Bernafaskan Keagamaan adalah Koondisi ideal dimana seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan.

Adapun misi sebagai berikut:

Misi	
Misi 1	: Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
Misi 2	: Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal
Misi 3	: Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal
Misi 4	: Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
Misi 5	: Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan
Misi 6	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi
Misi 7	: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Berdasarkan misi kepala daerah, Bappelitbangda sebagai urusan penunjang menitikberatkan perannya dalam pencapaian **Misi Ke-Enam** yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi”**.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bapeeda untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai urusan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong, antara lain :

Tabel 5.
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Bappelitbangda Kabupaten Barru

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1.	Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.	Keterlibatan unsur perencana dan penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
2.	Belum optimalnya sistem database dan belum optimalnya monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan.	Telah terbentuknya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Koordinasi tim antara bidang-bidang perencana dengan OPD koordinasinya.
3.	Dinamika Perundang-undangan.	Rapat koordinasi teknis pembangunan daerah tingkat Nasional dan tingkat Provinsi dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah

Sumber Data : Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Penelaahan dokumen Renstra Kementerian dan Provinsi Sulawesi Selatan didalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barru menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan yaitu keselarasan dokumen antara tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Telaah dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Renstra Bappenas, Kemendagri maupun Renstra Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait langsung dengan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru.

a) Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian PPN/ Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 4 (dua) sasaran strategis dalam Renstra 2020-2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional.
3. Terwujudnya kenijakan pembangunan nasional yang visioner.
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 maka dapat ditelaah sebagai berikut:

- Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Tahun 2020-2024, Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2024 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada salahsatu sasaran pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 ***yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.***
- Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

b) Review Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 telah menetapkan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, maka Bappelitbangda Kabupaten Barru memiliki kontribusi yang cukup besar yang akan dilakukan dengan mendukung beberapa kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri antara lain:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi dan;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam negeri.

Tabel 6.
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Berdasarkan Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Menegah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Renstra Bappenas			
a.	% Keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rancangan kerja K/L dan Daerah	Sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah yang belum optimal	Perbedaan Periode waktu Perencanaan berpengaruh terhadap perencanaan di daerah	Dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang baik di Kementerian memudahkan koordinasi.
2.	Renstra Kemendagri			
	% Pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	Pemanfaatan hasil kelitbang dan inovasi belum dioptimalkan sebagai rekomendasi kebijakan Pemerintah Kabupaten	Belum Optimalnya Koordinasi untuk memaksimalkan hasil-hasil penelitian dan inovasi untuk kebutuhan perencanaan	Dukungan Pemerintah Pusat terhadap penerapan penelitian dan inovasi dalam pembangunan dan pengembangan daerah

Sumber Data : Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

c) Review Rencana Strategis Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara melaksanakan tugas jangka waktu tahun 2018-2023 telah menetapkan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, maka Bappelitbangda Kabupaten Barru memiliki kontribusi yang cukup besar yang akan dilakukan dengan mendukung beberapa

kebijakan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan;
3. Peningkatan kualitas integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan antar tingkatan pemerintahan;
4. Peningkatan kualitas pengumpulan, penyajian dan pengamanan data dan informasi guna mengoptimalkan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta pengkajian kewilayahan;
5. Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pendanaan hingga evaluasi.
6. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan pemerintah daerah.

Tabel 7.

Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Berdasarkan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Menegah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan			
a.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	Belum Optimalnya Sinkronisasi Perencanaan Program tingkat Provinsi dan Kabupaten	Data mikro penunjang perencanaan berbasis kawasan (Kecamatan) masih terbatas.	Terciptanya komitmen antara Prov dan Kabupaten.
b.	Meningkatnya hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah	Masih rendahnya kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Belum Optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi bagi OPD Kabupaten Barru dalam	Setiap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan harus melalui Bappeda.

			menyusun Dokumen Perencanaan	
--	--	--	------------------------------------	--

Sumber Data : Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a) Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru

Dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2021-2026, sesuai dengan ketentuan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031. Memperhatikan arahan RTRW Kabupaten yang merupakan acuan pemanfaatan ruang, maka Bappelitbangda Kabupaten Barru sebagai pelaksana urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan mempunyai peran dalam menyesuaikan pelaksanaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

b) Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Barru

Pemerintah Kabupaten Barru dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah merumuskan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap RPJMD 2021-2026 yang dilakukan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dalam penentuan program dan kegiatan yang berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan, pada penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Barru terdapat Indikator yang menjadi kewenangan Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

Tabel 8.
Tabel Indikator TPB Bappelitbangda

NO. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator TPB	Satuan	Target (PERPRES 59/2017)
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Persentase Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	%	Menurun Menjadi 7-8 %
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,	Laju pertumbuhan PDB per kapita		Meningkat

	kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua			
		PDB per kapita		Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		Ada
		Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		Ada

Sumber Data : Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

Tabel 9.
Faktor Penghambat dan Pendorong Terkait Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru Ditinjau dari Keterlibatan RTRW dan KLHS

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Keterlibatan RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas dan fungsi Bappelitbangda pada peran koordinasi	Dokumen RTRW belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan	Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Barru
2	Keterlibatan KLHS	- Belum Optimalnya pengawalan program dan kegiatan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan - Data pendukung	Dinamika Perundang-undangan.	Regulasi tentang KLHS yang mewajibkan untuk penyusunan dokumen KLHS setiap dokumen perencanaan

Sumber Data : Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Bappelitbangda Kabupaten Barru senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bappelitbangda Kabupaten Barru dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Barru dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu :

- a) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- b) Sasaran Jangka Menengah pada Resntra K/L;
- c) Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;
- d) Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat daerah; dan
- e) Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun review singkat dari aspek-aspek dalam perumusan isu-isu strategis sebagaimana yang telah disajikan sebagai berikut:

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

- a) Gambaran pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru;

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui hampir keseluruhan target di dalam renstra Bappelitbangda telah tercapai. Namun demikian tantanganperencanaan kedepan akan lebih dinamis sehingga

Bappelitbangda harus dapat merumuskan strategi yang tepat dalam rangka menghadapi tantangan tersebut.

b) Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas;

- Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/ Bappenas Indikator Sasaran strategis dalam Renstra Bappenas yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bappelitbangda adalah keselarasan rencana pembangunan nasional dengan Rencana KerjaK/L dan Daerah. Yang berarti bahwasanya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru akan berdampak pada penyusunan nasional.
- Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri Indikator Sasaran strategis dalam Renstra Kemendagri yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bappelitbangda adalah persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

c) Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru;

Secara umum berdasarkan Renstra yang ingin diraih dalam jangka menengah adalah kualitas perencanaan dan hasil penelitian yang dapat diterapkan dalam kebijakan.

d) Implikasi RTRW bagi pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru;

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tataruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.

e) Implikasi KLHS bagi pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Barru;

Implikasi dari KLHS adalah Bappelitbangda dalam menyusun perencanaan harus melakukan kajian Lingkungan Hidup, disebabkan dalam perencanaan pembangunan harus melihat perencanaan mana saja yang dapat memberikan dampak atau resiko bagi lingkungan.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan kualitas data dengan memanfaatkan satu data berbasis teknologi modern;
- b) Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah;
- c) Membangun koordinasi antar bidang dan memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan fasilitas pendukung penelitian dan pengembangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah; dan
- e) Mendorong ASN aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan 1 OPD 1 Inovasi.

E. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);

6. Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 23);

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penyusunan Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024 adalah:

Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Barru dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappelitbangda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Visi dan misi Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Barru yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. Visi Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 adalah :

“Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan”

1. **Sejahtera** adalah Kondisi dimana masyarakat Barru hidup makmur dan sejahtera baik secara ekonomo maupun sosial
2. **Mandiri** adalah Kondisi dimana Kabupaten Barru mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya dengan tetap mengedepankan prinsip keterlibatan peran multisektor untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan kabupaten Barru.
3. **Berkeadilan** adalah Kondisi ideal dimana Dampak Pembangunan Kabupaten Barru dinikmati seluruh masyarakat dan tidak ada yang tertinggal di belakang
4. **Bernafaskan Keagamaan** adalah Kondisi ideal dimana seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik dalam proses maupun hasil yang diharapkan

Visi di atas menjelaskan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Barru melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yaitu misi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan

menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 adalah :

- MISI 1 : Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya
- MISI 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal
- MISI 3 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya lokal
- MISI 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
- MISI 5 : Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan
- MISI 6 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi
- MISI 7 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rencana strategis, maka Bappelitbangda menetapkan dua tujuan dan tiga sasaran strategis disertai dengan indikator tujuan dan sasaran yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Bappelitbangda dalam lima tahun ke depan, yaitu:

Tujuan 1 : Mewujudkan Perencanaan dan Pengembangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi hasil (T1)

Indikator Tujuan: Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai SAKIP Kabupaten Barru

Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai SAKIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada sub komponen dokumen Perencanaan Strategis dan sub komponen dokumen Perencanaan kinerja Tahunan. Penilaian pada masing-masing sub komponen meliputi 1) pemenuhan, 2) kualitas, dan 3) implementasi.

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan Daerah (T1.S1)

Indikator Sasaran : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)
(T1.S1.IS1)

IPPD selain digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan rencana pembangunan pada tingkat kabupaten, dapat pula digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan perencanaan pada tingkat Perangkat Daerah.

IPPD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola perencanaan daerah dalam periode tertentu. Dimensi Indeks adalah suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran IPPD.

IPPD ini diukur berdasarkan 3 (tiga) dimensi yaitu:

1. Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Definisi : Bauran program Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran program dalam RKPD baik antar waktu, antar ruang, antar fungsi.

Diukur dengan melihat:

- keselarasan sasaran program RKPD dengan RPJMD
- keselarasan sasaran program Renja dengan RKPD
- keselarasan sasaran program Renstra dengan RPJMD
- keselarasan sasaran program Renja dengan Renstra

2. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Definisi : Keterpaduan dukungan anggaran untuk mencapai sasaran Kegiatan dalam RKPD dan Renja baik antar waktu, antar ruang, antar fungsi.

Diukur dengan melihat:

- kegiatan pada RKPD yang masuk dalam APBD
- kegiatan pada Renja Perangkat Daerah yang masuk dalam DPA Perangkat Daerah

3. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

Definisi : Keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran PN, PP, KP dalam RKP dan pencapaian sasaran PP, KP dalam RKPD Provinsi.

Diukur dengan melihat:

- kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP dalam RKP
- kegiatan prioritas RKPD yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP prioritas dalam RKPD Provinsi

- o kegiatan prioritas Renja Perangkat Daerah yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP prioritas dalam Renja K/L
- o kegiatan prioritas Renja Perangkat Daerah yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PP, KP prioritas dalam Renja Perangkat daerah Provinsi

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pengembangan daerah yang visioner (T1.S2)

Indikator Sasaran :

1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Definisi : Membandingkan Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terhadap jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah. Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan (T1.S2.IS1)

2. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Definisi : Membandingkan jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah terhadap jumlah inovasi yang diusulkan (T1.S2.IS2)

Tujuan 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (T2)

Indikator Tujuan: Nilai Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Nilai Reformasi Birokrasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan yaitu 1) Manajemen Perubahan, 2) Deregulasi Kebijakan, 3. Penataan dan Penguatan Organisasi, 4 Penataan Tatalaksana, 5) Penataan Sistem Manajemen SDM, 6) Penguatan Akuntabilitas, 7. Penguatan Pengawasan, dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (T2.S1)

Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (T2.S1.IS1)

Nilai SAKIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada komponen 1)

Perencanaan Kinerja, 2) Pengukuran Kinerja, 3) Pelaporan Kinerja, 4) evaluasi Kinerja dan 5) Capaian Kinerja.

Adapun kesesuaian antara visi dan misi kepala daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 dengan tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 10
Kesesuaian Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021 – 2026

RPJMD KABUPATEN BARRU					RENSTRA BAPPELITBANGDA			
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi (MISI 6)	Meningkatkan Manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih	NILAI REFORMASI BIROKRASI	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik	NILAI SAKIP	Mewujudkan Perencanaan dan Pengembangan Daerah yang Akuntabel dan berorientasi hasil	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten Barru	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
							Terwujudnya pengembangan daerah yang visioner	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang
					Mewujudkan Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penerapan SAKIP Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber Data : Renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Perangkat Daerah termasuk Bappelitbangda Kabupaten Barru untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Perangkat Daerah, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan Perangkat Daerah.

Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11.
Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Poin
2	Terwujudnya Pengembangan Daerah yang Visioner	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	100%
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100%
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	B (60,01-70,00)

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2024

Bappelitbangda Kabupaten Barru pada tahun 2024 melaksanakan kegiatan dengan pagu anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 3.898.331.446. Adapun dengan melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 3.992.376.733 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 3.854.376.733 dan belanja modal Rp. 138.000.000.

Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2024 disusun berdasarkan dengan Renstra Penyesuaian Bappelitbangda Tahun 2021-2026. Pada Tahun 2024 terdapat perubahan nilai pagu program kegiatan yang diakomodir dalam Perubahan Renja Tahun 2024. Adapun faktor perubahan renja adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian program kegiatan mengacu dengan RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026
2. Adanya program dan kegiatan yang tidak bisa untuk direalisasikan secara maksimal.

Perubahan Renja Bappelitbangda dalam rangka mencapai sasaran kinerja tahun 2024 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 12.
Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TAHUN RENCANA 2024					PAGU INDIKATIF				
					LOKASI		TARGET KINERJA			KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	DPA	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN (PAGU RKPD 2024)	PAGU DPA POKOK	PAGU DPA 2024 SETELAH PERUBAHAN
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						5.218.898.98	3.898.331.46	43.991.376.733	93.045.287
5	01		PERENCANAAN		PERENCANAAN						4.782.000.898	3.837.244.946	43.880.884.733	43.639.787
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Level 3	Level 3	Level 3	3.480.787.198	3.159.361.446	43.091.210.633	-	68.150.813
				Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan		Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan	20 JPL	20 JPL	20 JPL					

			6	1	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan									
5	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Baru	Baru	2 Paket	2 Paket	1 Paket	9.510.600	7.171.400	7.521.400	350.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Baru	Baru	6 Paket	6 Paket	1 Paket	4.079.000,0	1.786.000,0	1.786.000,0	-
5	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Baru	Baru	4 Paket	4 Paket	1 Paket	4.152.500,0	2.900.000,0	2.900.000,0	-
5	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Baru	Baru	4 Paket	4 Paket	1 Paket	6.437.500,0	1.180.000,0	1.180.000,0	-
5	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Baru	Baru	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	1.920.000,0	0,00	360.000,00	360.000,00
5	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Baru	Baru	126 Laporan	74 Laporan	127 Laporan	169.393.000	99.074.000	271.882.000	172.808.000
5	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah			100%	0%	100%	34.142.000	0,00	138.000.000	138.000.000

					Pemerintah Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah	Pemerintah Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah									
5	0	0	2	0	-	-	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Barru	0 Unit	0 Unit	104 Unit	0,00	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00
5	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Barru	Barru	9 Unit	0 Unit	3 Unit	34.142.000,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	127.806.192	123.006.192	111.006.192	-12.000.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Barru	Barru	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	52.206.192,00	52.206.192,00	52.206.192,00	-
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Barru	Barru	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.600.000,00	70.800.000,00	58.800.000,00	-12.000.000,00
5	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan			100%	100%	100%	44.525.000,00	23.525.000,00	55.804.340,00	32.279.340,00

					Pemerintahan Daerah	pemerintahan daerah yang dipelihara	Pemerintahan Daerah	pemerintahan daerah yang dipelihara									
5	01	01	200092		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Barru	Barru	6 Unit	6 Unit	7 Unit	15.025.000,00	15.025.000,00	26.475.000,00	11.450.000,00
5	01	03	200015		-	-	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	Barru	0 Unit	0 Unit	30 Unit	0,00	0,00	12.633.500,00	12.633.500,00
5	01	01	200096		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Barru	Barru	51 Unit	24 Unit	24 Unit	21.450.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	-
5	01	01	200099		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Barru	Barru	1 Unit	0 Unit	1 Unit	8.050.000,00	0,00	8.195.840,00	8.195.840,00
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat			100%	100%	100%	743.142.500	423.902.500	461.633.000	37.730.500

						waktu		waktu									
						Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD		Persentase rata-rata capaian kinerja program RPJMD			100%	100%	100%				
5	0	0	2	0		Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai Peraturan PerUUan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai Peraturan PerUUan			100%	100%	100%	655.458.000	368.901.500	407.272.000	38.370.500,00
	1	2	0	1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai Peraturan PerUUan			100%	100%	100%	0	0	0	00
5	0	0	2	0		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Barru	Barru	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	11.905.000,00	9.676.000,00	6.486.000,00	3.190.000,00
	1	2	0	1		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Barru	Barru	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	00	00	00	00
5	0	0	2	0		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Barru	Barru	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	23.154.000,00	14.645.000,00	10.535.000,00	4.110.000,00
	1	2	0	1		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Barru	Barru	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	00	00	00	00
5	0	0	2	0		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Barru	Barru	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	90.343.000,00	48.131.000,00	42.915.000,00	5.216.000,00
	1	2	0	1		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Barru	Barru	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	00	00	00	00
5	0	0	2	0		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/R KPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/R KPD)	Barru	Barru	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	530.056.000	296.449.500	347.336.000	50.886.500
	1	2	0	1		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/R KPD)	Barru	Barru	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	0	0	0	00

5	0	0	2	0	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan			100%	100%	100%	7.221.500	3.695.000	3.695.000	
5	0	0	2	0	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Baru	Baru	44 Orang	44 Orang	44 Orang	7.221.500,00	3.695.000,00	3.695.000,00	
5	0	0	2	0	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan			100%	100%	100%	80.463.000,00	51.306.000,00	50.666.000,00	640.000,00
5	0	0	2	0	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Baru	Baru	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	12.761.000,00	6.527.000,00	5.887.000,00	640.000,00

5	0	0	2	0	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Barru	Barru	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	67.702.000,00	44.779.000,00	44.779.000,00	
5	0	0	3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi dan Kajian Sektoral yang mendukung Perencanaan Pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan PerUUan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi dan Kajian Sektoral yang mendukung Perencanaan Pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan PerUUan			100%	100%	100%	558.071.200	253.981.000	328.041.100	74.060.100
5	0	0	2	0	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun			48 Rekomendasi / Kajian / Laporan	48 Rekomendasi / Kajian / Laporan	48 Rekomendasi / Kajian / Laporan	220.566.200	107.068.000	157.107.800	50.039.800
5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang yang Dikoordinir	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang yang Dikoordinir	Barru	Barru	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	44.168.400,00	24.496.800,00	24.749.600,00	252.800

					Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)									
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Barru	Barru	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	63.317.000,00	33.025.000,00	82.216.000,00	49.191.000,00
5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Barru	Barru	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	25.217.900,00	12.969.400,00	12.281.400,00	688.000,00
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Barru	Barru	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	87.862.900,00	36.576.800,00	37.860.800,00	1.284.000,00
5	0	0	2	0	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya	Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya	Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang			18 Rekomendasi / Kajian / Laporan	18 Rekomendasi / Kajian / Laporan	18 Rekomendasi / Kajian / Laporan	168.363.600	60.997.200	43.326.800	17.670.400

					Alam)	Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun	Alam)	Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun									
5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Baru	Baru	8	8	8	28.831.800,00	11.481.800,00	10.953.800,00	528.000,00
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Baru	Baru	4	4	4	46.587.000,00	18.114.600,00	11.136.000,00	6.978.600,00
5	0	0	2	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Baru	Baru	4	4	4	57.820.800,00	15.822.800,00	14.626.000,00	1.196.800,00
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	Baru	Baru	2	2	2	35.124.000,00	15.578.000,00	6.611.000,00	8.967.000,00

					dan RKPd)	dan RKPd)	dan RKPd)	dan RKPd)										
5	0	0	2	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Barru	Barru	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	4.270.600,00	2.207.000,00	1.755.000,00	-	452.000,00
5	0	5			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							436.898.100	61.086.500	110.492.000	-	49.405.500
5	0	0	2		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nilai Indeks Inovasi Daerah			>842 Point	≥ 60,25 Poin	≥ 60,25 Poin	436.898.100	61.086.500	110.492.000	-	49.405.500
5	0	0	2	0	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan			100%	100%	100^%	318.230.800	34.646.000	58.291.000	-	23.645.000
5	0	0	2	0	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Barru	Barru	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	77.927.000	20.603.500	44.248.500	-	23.645.000

					Otonomi Daerah	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Otonomi Daerah	Penyelenggaraan Otonomi Daerah									
5	05	02	200015		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Barru	Barru	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	73.173.800	14.042.500	14.042.500	
5	05	02	200013		Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	-	-	Barru	-	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	70.652.500	0,00	0,00	
5	05	02	200014		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	-	-	Barru	-	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	96.477.500	0,00	0,00	
5	05	02	20004		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan			100%	100%	100%	118.667.300	26.440.500	52.201.000	25.760.500

5	0	0	2	0	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Barru	Barru	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	118.667.300	26.440.500	52.201.000	25.760.500
---	---	---	---	---	--	---	--	---	-------	-------	-----------	-----------	-----------	-------------	------------	------------	------------

Sumber Data : Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2024

Rekapitulasi pendanaan berdasarkan program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupkosinya adalah:

Tabel 13.
Rekapitulasi Pendanaan Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.092.210.633
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 461.633.000
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 328.041.100
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 110.492.000

Sumber Data : DPPA Bappelitbangda Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2020 berdasar pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Bappelitbangda Kabupaten Barru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Barru Nomor 290 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 14.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Poin	97,778 Poin	97,78%
2	Terwujudnya Pengembangan Daerah yang Visioner	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100%	100%	100%

Sumber Data : Bidang Penanggungjawab Kegiatan pada Bappelitbangda Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

- a) Realisasi indikator kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” tahun 2024 sebesar 100 Poin tidak sesuai dengan target yaitu sebesar 97,778 Poin dengan capaian 97,78%. Formula yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah:

No	Dimensi	Indeks	Total IPPD					
1	Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (D.1)	60,000	=	D.1	+	D.2	+	D.3
2	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (D.2)	17,778	=	60,000	+	17,778	+	20,000
3	Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat, Provinsi dan Daerah (D.3)	20,000	=	97,778				

- b) Realisasi indikator kinerja “Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan” tahun 2024 sebesar 100% telah sesuai dengan target yaitu sebesar 100% dengan

capaian 100%. Formula yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah:

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	=	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah}}$	$\frac{7}{7}$	x	100%	=	100%
--	---	---	---------------	---	------	---	------

Catatan = Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan

Jumlah kelitbangan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan pada tahun 2024 adalah:

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah
 2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanggungjawab Sosial di Lingkungan Perusahaan
 3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2024
 4. Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025
 5. Penilaian dan Perhitungan IPKD
 6. KAK Pelaksanaan Barang dan Jasa Lainnya pada Sub Kegiatan Lingkup Bidang Litbang
 7. Rancangan Regulasi tentang Pembentukan BRIDA dan Bapperida
- c) Realisasi indikator kinerja “Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah” tahun 2023 sebesar 100% telah sesuai dengan target yaitu sebesar 100% dengan capaian 100%. Formula yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah:

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	=	$\frac{\text{Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan}}{\text{Jumlah inovasi yang diusulkan}}$	$\frac{27}{27}$	x	100%	=	100%
--	---	--	-----------------	---	------	---	------

Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah pada tahun 2024 adalah:

NO	INOVASI	PERANGKAT DAERAH
1	Bolata Yassi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 LaO KeDesa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 KIAMiSOL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	KEGIATAN RENCANA KOTA BERBASIS DIGITAL	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	TARO ADA TARO GAU	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
6	SIM-KGB Online	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

7	Sistem Pendaftaran Online Pasien Lama Rawat Jalan	UPTD RSUD La Patarai
8	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 MATIPPe	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 GISA SIDesaKu MaLePPu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	KUPAS Covid-19 (Ukuran Pas, Aman dan Sehat lawan Covid-19)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
11	PEPAYA MATANG	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
12	SIM-MUTASIPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	GERAKAN JUS MANIS	Puskesmas Ralla
14	POSKESMAS (Pos Kesehatan Masjid)	Puskesmas Pekkae
15	"Klik Desa" Klinik Layanan Konsultasi Desa	Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	RUMAH KLINIK ANGGARAN	Inspektorat
17	LaNCAR D'DukCapil MCP-19 pada Sektor PTSP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	MPOK DARTI	DINAS SOSIAL
19	Wisata Posyandu	PUSKESMAS PALAKKA
20	Posyandu SUBUR (Sore Hari Bagi yang Tidak Hadir)	PUSKESMAS MANGKOSO
21	GEMAR SYANTIK (GERAKAN MARENNU SAYANG ANAK, IBU DAN KELUARGA)	PUSKESMAS PUJANANTING
22	Pokdarwis + (Kelompok Sadar Wisata Plus)	Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olah Raga
23	SAYANG DIFABEL DAN KELOMPOK RENTAN COVID-19	Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olah Raga
24	AMAN, IMAN, IMUN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25	GEMA DOA CAHAYA HATI	PUSKESMAS DOI-DOI
26	SIM-VALIDASI	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
27	SURAT LAYANAN MELAKSANAKAN KIR KENDARAAN (S@LAMAki)	DINAS PERHUBUNGAN

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 15.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN			CAPAIAN TAHUN		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	94,346 Poin	95,261 Poin	97,778 Poin	94,35%	95,26%	97,78%

2	Terwujudnya Pengembangan Daerah yang Visioner	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Bidang Penanggungjawab Kegiatan pada Bappelitbangda Tahun 2024

Perbandingan Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir memperlihatkan indikator kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” mengalami peningkatan setiap tahun dimana pada tahun 2023 peningkatan sebanyak 0,915 Poin dibandingkan pada tahun 2022 dan pada tahun 2024 peningkatan sebanyak 2,517 Poin dibandingkan pada tahun 2023. Sementara itu, indikator kinerja “Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan” dan indikator kinerja “Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah” pada tahun 2024 realisasi dan capaiannya sama dengan tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 16.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target s/d Tahun 2025	Target s/d Tahun 2024	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024
1	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Poin	100 Poin	97,778 Poin
2	Terwujudnya Pengembangan Daerah yang Visioner	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100%	100%	100%

Sumber Data : Bidang Penanggungjawab Kegiatan pada Bappelitbangda Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra, diuraikan sebagai berikut:

- a) Realisasi indikator kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” tahun 2024 sebesar 97,778 Poin tidak sesuai dengan target Renstra tahun berjalan. Meskipun berdasarkan perbandingan ini realisasi tidak sesuai dengan target, proyeksi target yang akan digunakan pada tahun pelaksanaan dan tahun rencana serta tahun selanjutnya tetap menggunakan proyeksi sesuai arah Renstra untuk mencapai target Renstra sampai dengan tahun 2026 sebagai periode akhir perencanaan jangka menengah sebesar 100%.
- b) Realisasi indikator kinerja “Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan” tahun 2024 sebesar 100% telah sesuai dengan target Renstra tahun berjalan. Berdasarkan perbandingan ini maka untuk mencapai target Renstra sampai dengan tahun 2026 sebagai periode akhir perencanaan jangka menengah sebesar 100% berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun sebelumnya sehingga proyeksi target pada tahun pelaksanaan dan tahun rencana serta tahun selanjutnya digunakan proyeksi sesuai arah Renstra.
- c) Realisasi indikator kinerja “Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah” tahun 2024 sebesar 100% telah sesuai dengan target Renstra tahun berjalan. Berdasarkan perbandingan ini maka untuk mencapai target Renstra sampai dengan tahun 2026 sebagai periode akhir perencanaan jangka menengah sebesar 100% berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang sebanding dengan tahun sebelumnya sehingga proyeksi target pada tahun pelaksanaan dan tahun rencana serta tahun selanjutnya digunakan proyeksi sesuai arah Renstra.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

a) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” memiliki realisasi kurang dari target. Realisasi yang rendah terdapat pada Dimensi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (D.2). rendahnya pencapaian ini disebabkan karena kemampuan keuangan daerah serta analisis pencapaian target kinerja kegiatan yang menunjukkan beberapa kegiatan dapat dilaksanakan secara parallel untuk

mencapai target indicator. Solusi untuk mengatasi penyebab masalah adalah diperlukan analisis lebih dalam terkait usulan kegiatan dengan kemampuan keuangan daerah serta identifikasi kegiatan yang beririsan dari sisi indicator untuk efisiensi anggaran.

Sementara itu pada Dimensi Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (D.1) telah sesuai target. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target adalah terpenuhinya Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD merupakan konsistensi yang terbangun dalam Tim Penyusun RKPD serta hasil evaluasi Dokumen RKPD dari Bappelitbangda Provinsi sangat menentukan terpenuhinya keselarasan sasaran program antara RKPD dan RPJMD. Selanjutnya, diperlukan keberlanjutan terhadap konsistensi perencanaan serta memaksimalkan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam penyusunan RKPD

Demikian halnya pada Domensi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat, Provinsi dan Daerah (D.3) telah sesuai target. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target adalah:

1. Sinergitas perencanaan kabupaten dengan provinsi sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam pencapaian sasaran Program Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, diperlukan dukungan pendanaan lebih dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pencapaian target sasaran pemerintah provinsi di Kabupaten Barru
2. Sinergitas perencanaan kabupaten dengan pusat sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam pencapaian sasaran Program Nasional. Selanjutnya, diperlukan dukungan pendanaan lebih dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Barru untuk pencapaian target sasaran Prioritas Nasional

b) Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Indikator Kinerja “Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan” memiliki realisasi sama dengan target. Hal ini dipengaruhi oleh telah diintegrasikannya seluruh dokumen kelitbangan kedalam perencanaan daerah.

c) Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Realisasi indikator kinerja “Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah” sesuai dengan target. Hal ini disebabkan adanya kebijakan

daerah bagi seluruh perangkat daerah untuk membuat inovasi yang dapat menunjang kinerja pegawai dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Kebijakan daerah dimaksud berupa percepatan pelaksanaan inovasi daerah yang merupakan salah satu program prioritas pembangunan daerah tahun 2024. Selain itu, Kabupaten Barru pada tahun 2024 mengikuti arahan pemerintah pusat pada dua kementerian/lembaga masing-masing:

1. Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti Inovasi Government Award (IGA) **Kategori Kabupaten** dengan nilai 48.50 berada pada peringkat 318 dan masuk pada predikat INOVATIF
2. Kementerian Riset dan Teknologi untuk menghitung nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan nilai indeks 2,91 masuk pada kategori SEDANG

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya). Rumus yang digunakan adalah:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad \rightarrow \quad TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasaran

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika $IE \leq SE$ maka dianggap **tidak efisien**.

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran kinerja pada Bappelitbangda Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 17.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Output			Input			Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Keterangan		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3	Level	3	Level	100,00	3.092.210.633,00	2.848.589.614,00	92,12	1,09	0,09	efisiensi
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	%	100,00	2.499.737.701,00	2.326.911.244,00	93,09	1,07	0,07	efisiensi
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26	Orang / Bulan	26	Orang / Bulan	100,00	2.499.737.701,00	2.326.911.244,00	93,09	1,07	0,07	efisiensi
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	100,00	287.662.400,00	276.690.989,00	96,19	1,04	0,04	efisiensi
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	1	Paket	100,00	2.033.000,00	1.963.000,00	96,56	1,04	0,04	efisiensi
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Paket	4	Paket	100,00	7.521.400,00	6.849.500,00	91,07	1,10	0,10	efisiensi
1.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2	paket	2	paket	100,00	1.786.000,00	1.636.000,00	91,60	1,09	0,09	efisiensi
1.2.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	Paket	4	Paket	100,00	2.900.000,00	2.880.000,00	99,31	1,01	0,01	efisiensi
1.2.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	Paket	1	Paket	50,00	1.180.000,00	115.000,00	9,75	5,13	4,13	efisiensi
1.2.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	100,00	360.000,00	352.500,00	97,92	1,02	0,02	efisiensi
1.2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127	Laporan	123	Laporan	96,85	271.882.000,00	262.894.989,00	96,69	1,00	0,00	efisiensi
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	96,26	%	100,00	138.000.000,00	109.800.000,00	79,57	1,26	0,26	efisiensi
1.3.1	Pengadaan Mebel	104	Unit	100	Unit	96,15	99.000.000,00	70.800.000,00	71,52	1,34	0,34	efisiensi
1.3.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	Unit	3	Unit	100,00	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	1,00	0,00	efisiensi
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100,00	111.006.192,00	95.632.881,00	86,15	1,16	0,16	efisiensi
1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24	Laporan	24	Laporan	100,00	52.206.192,00	45.832.881,00	87,79	1,14	0,14	efisiensi

1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	12	Laporan	100,00	58.800.000,00	49.800.000,00	84,69	1,18	0,18	efisiensi
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	%	100,00	55.804.340,00	39.554.500,00	70,88	1,41	0,41	efisiensi
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7	unit	7	unit	77,21	26.475.000,00	20.442.000,00	77,21	1,00	0,00	efisiensi
1.5.2	Pemeliharaan Mebel	30	unit	30	unit	100,00	12.633.500,00	12.633.500,00	100,00	1,00	0,00	efisiensi
1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24	unit	19	unit	79,17	8.500.000,00	6.479.000,00	76,22	1,04	0,04	efisiensi
1.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	0	unit	0,00	8.195.840,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	kegiatan tidak dilaksanakan
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100	%	100	%	100,00	461.633.000,00	420.211.135,00	91,03	1,10	0,10	efisiensi
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100	%	100	%	100,00	407.272.000,00	382.757.035,00	93,98	1,06	0,06	efisiensi
2.1.1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	Berita Acara	1	Berita Acara	100,00	6.486.000,00	6.176.000,00	95,22	1,05	0,05	efisiensi
2.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1	Berita Acara	1	Berita Acara	100,00	10.535.000,00	9.907.500,00	94,04	1,06	0,06	efisiensi
2.1.3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2	Berita Acara	2	Berita Acara	100,00	42.915.000,00	35.797.750,00	83,42	1,20	0,20	efisiensi
2.1.4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	11	Dokumen	11	Dokumen	100,00	347.336.000,00	330.875.785,00	95,26	1,05	0,05	efisiensi
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	%	100,00	3.695.000,00	1.240.000,00	33,56	2,98	1,98	efisiensi
2.2.1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	44	Orang	44	Orang	100,00	3.695.000,00	1.240.000,00	33,56	2,98	1,98	efisiensi
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	%	100,00	50.666.000,00	36.214.100,00	71,48	1,40	0,40	efisiensi

2.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	8	Laporan	8	Laporan	100,00	5.887.000,00	5.328.600,00	90,51	1,10	0,10	efisiensi
2.3.2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	16	Laporan	16	Laporan	100,00	44.779.000,00	30.885.500,00	68,97	1,45	0,45	efisiensi
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100	%	100	%	100,00	328.041.100,00	314.977.355,00	96,02	1,04	0,04	efisiensi
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	48	Rekomen dasi / Kajian / Laporan	48	Rekomen dasi / Kajian / Laporan	100,00	157.107.800,00	147.823.627,00	94,09	1,06	0,06	efisiensi
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24	Dokumen	24	Dokumen	100,00	24.749.600,00	23.626.500,00	95,46	1,05	0,05	efisiensi
3.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	82.216.000,00	78.081.164,00	94,97	1,05	0,05	efisiensi
3.1.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	Dokumen	8	Dokumen	100,00	12.281.400,00	11.678.400,00	95,09	1,05	0,05	efisiensi
3.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	Laporan	4	Laporan	100,00	37.860.800,00	34.437.563,00	90,96	1,10	0,10	efisiensi
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	18	Rekomen dasi / Kajian / Laporan	18	Rekomen dasi / Kajian / Laporan	100,00	43.326.800,00	42.625.030,00	98,38	1,02	0,02	efisiensi

3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	Dokumen	8	Dokumen	100,00	10.953.800,00	10.811.750,00	98,70	1,01	0,01	efisiensi
3.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	4	Laporan	4	Laporan	100,00	11.136.000,00	10.896.500,00	97,85	1,02	0,02	efisiensi
3.2.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	14.626.000,00	14.343.880,00	98,07	1,02	0,02	efisiensi
3.2.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2	Laporan	2	Laporan	100,00	6.611.000,00	6.572.900,00	99,42	1,01	0,01	efisiensi
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	33	Rekomen dasi / Kajian / Laporan	33	Rekomen dasi / Kajian / Laporan	100,00	127.606.500,00	124.528.698,00	97,59	1,02	0,02	efisiensi
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	Dokumen	8	Dokumen	100,00	42.681.500,00	42.308.422,00	99,13	1,01	0,01	efisiensi
3.3.2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	4	Laporan	4	Laporan	100,00	82.670.000,00	80.149.276,00	96,95	1,03	0,03	efisiensi
3.3.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14	Dokumen	14	Dokumen	100,00	500.000,00	423.500,00	84,70	1,18	0,18	efisiensi
3.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	1.755.000,00	1.647.500,00	93,87	1,07	0,07	efisiensi
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	60,25	Poin	34,34	Poin	56,99	110.492.000,00	108.163.783,00	97,89	0,58	-0,42	efisiensi

4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	%	100	%	100,00	58.291.000,00	57.069.933,00	97,91	1,02	0,02	efisiensi
4.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1	Laporan	1	Laporan	100,00	44.248.500,00	43.713.631,00	98,79	1,01	0,01	efisiensi
4.1.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1	Laporan	1	Laporan	100,00	14.042.500,00	13.356.302,00	95,11	1,05	0,05	efisiensi
4.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	%	100	%	100,00	52.201.000,00	51.093.850,00	97,88	1,02	0,02	efisiensi
4.2.1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1	Laporan	1	Laporan	100,00	52.201.000,00	51.093.850,00	97,88	1,02	0,02	efisiensi

Sumber Data : Bidang Penanggungjawab Kegiatan pada Bappelitbangda Tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya Bappelitbangda Tahun 2024 memperlihatkan secara umum program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka mencapai sasaran Bappelitbangda Tahun 2025 dikatakan efisien. Sementara itu terdapat 1 (satu) subkegiatan yaitu “Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya” tidak dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran terhadap tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

a) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang mendukung pencapaian Kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” terdiri dari 2 (dua) program, 6 (enam) kegiatan dan 19 sub kegiatan, yaitu

1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, kegiatannya adalah:

1.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, sub kegiatannya adalah:

1.1.1. Pelaksanaan Konsultasi Publik. Indikatornya adalah “Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik” dengan target 2 Berita Acara dan realisasi 2 Berita Acara.

1.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD. Indikatornya adalah “Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik” dengan target 1 Berita Acara dan realisasi 1 Berita Acara.

1.1.3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Indikatornya adalah “Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik” dengan target 1 Berita Acara dan realisasi 1 Berita Acara.

1.1.4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Indikatornya adalah “Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)” dengan target 11 Dokumen dan realisasi 11 Dokumen.

1.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, sub kegiatannya adalah:

- 1.2.1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah. Indikatornya adalah “Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi” dengan target 44 Orang dan realisasi 44 Orang.
- 1.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, sub kegiatannya adalah:
 - 1.3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota. Indikatornya adalah “Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan” dengan target 8 Laporan dan realisasi 8 Laporan.
 - 1.3.2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Indikatornya adalah “Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah” dengan target 16 Laporan dan realisasi 16 Laporan.
2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Kegiatannya adalah:
 - 2.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sub kegiatannya adalah:
 - 2.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Indikatornya adalah “Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)” dengan target 24 Dokumen dan realisasi 24 Dokumen.
 - 2.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Indikatornya adalah “Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan” dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan.

- 2.1.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Indikatornya adalah “Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)” dengan target 8 Dokumen dan realisasi 8 Dokumen.
- 2.1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Indikatornya adalah “Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia” dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan.
- 2.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), sub kegiatannya adalah:
 - 2.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Indikatornya adalah “Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)” dengan target 8 Dokumen dan realisasi 8 Dokumen.
 - 2.2.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Indikatornya adalah “Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian” dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan.
 - 2.2.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Indikatornya adalah “Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)” dengan target 4 Dokumen dan realisasi 4 Dokumen.

- 2.2.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Indikatornya adalah “Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA” dengan target 2 Laporan dan realisasi 2 Laporan.
- 2.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah, sub kegiatannya adalah:
 - 2.3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Indikatornya adalah “Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)” dengan target 8 Dokumen dan realisasi 8 Dokumen.
 - 2.3.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Indikatornya adalah “Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur” dengan target 4 Laporan dan realisasi 4 Laporan.
 - 2.3.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Indikatornya adalah “Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)” dengan target 14 Dokumen dan realisasi 14 Dokumen.
 - 2.3.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah. Indikatornya adalah “Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah” dengan target 7 Laporan dan realisasi 7 Laporan.

b) Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang mendukung pencapaian Kinerja “Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan” terdiri dari 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu

1. PROGRAM PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, kegiatannya adalah:**1.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, sub kegiatannya adalah:**

1.1.1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Indikatornya adalah “Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah” dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan.

1.1.2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi. Indikatornya adalah “Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi” dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan.

c) Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang mendukung pencapaian Kinerja “Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah” adalah PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dan sub kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif. Indikatornya adalah “Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif” dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan.

B. Realisasi Anggaran

Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2024 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.992.376.733 yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 3.854.376.733 dan Belanja Modal sebesar Rp. 138.000.000. Sementara itu, Bappelitbangda Kabupaten Barru bukan merupakan SKPD pendapatan sehingga dalam laporan keuangan tahun anggaran 2024 tidak memiliki sumber-sumber pendapatan daerah sehingga pos pendapatan pada Neraca tahun 2024 adalah nihil.

Belanja Operasi Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024 terdiri Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, sedangkan Belanja Modal adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dalam pencapaian kinerja keuangan terjadi selisih lebih terhadap pelaksanaan belanja tersebut dimana antara anggaran yang tersedia lebih besar daripada belanja yang dibutuhkan. Selisih tersebut dapat dilihat dengan perincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai:

Anggaran	Rp 2.499.737.701
Realisasi	Rp 2.326.911.244
Selisih	Rp 172.826.457

Belanja Barang dan Jasa:

Anggaran	Rp 1.354.639.032
Realisasi	Rp 1.255.230.643
Selisih	Rp 99.408.389

Belanja Peralatan dan Mesin:

Anggaran	Rp 138.000.000
Realisasi	Rp 109.800.000
Selisih	Rp 28.200.000

Rincian realisasi anggaran Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 18.
Realisasi Anggaran Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
BELANJA	3.992.376.733	3.691.941.887	300.434.846	92,47%
BELANJA OPERASI	3.854.376.733	3.582.141.887	272.234.846	92,94%
Belanja Pegawai	2.499.737.701	2.326.911.244	172.826.457	93,09%
Belanja Barang dan Jasa	1.354.639.032	1.255.230.643	99.408.389	92,66%
BELANJA MODAL	138.000.000	109.800.000	28.200.000	79,57%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.000.000	109.800.000	28.200.000	79,57%

Sumber Data : Laporan Akhir Tahun Bappelitbangda Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru, dengan berlandaskan pada visi, misi, tujuan dan sasaran serta program kerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.
2. Ditetapkannya Renstra sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barru Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barru Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta pedoman dan pengendalian kinerja program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Barru, dan pencapaian visi dan misi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.
3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2024 adalah dalam rangka pertanggungjawaban tertulis atas capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru bulan Januari hingga bulan Desember 2024 secara komprehensif.
4. Pencapaian kinerja pada tahun 2024 tidak lepas dari peran serta seluruh unit kerja organisasi Bappelitbangda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. Saran

Sebagai perbaikan dalam meningkatkan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langka-langka sebagai berikut:

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mendukung pelaksanaan Renstra Bappelitbangda kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dalam rangka memenuhi dan meningkatkan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2021-2026.
2. Menguatkan koordinasi yang bersifat internal maupun eksternal dengan mengadakan pertemuan atau rapat pembahasan secara berkala mengenai kebijakan-kebijakan terkait peningkatan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Barru dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja sesuai yang diharapkan, hendaknya dilakukan secara lebih matang dan cermat dengan memperhatikan tujuan dan manfaat program dan kegiatan terhadap organisasi dan masyarakat, kemampuan sumberdaya yang tersedia, termasuk adanya faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan, penghematan anggaran atau penambahan alokasi anggaran pada tahun berjalan, dan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Diperlukan adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan dalam rangka akuntabilitas keuangan sehingga kinerja organisasi dapat terukur, bermanfaat dan akuntabel.

Barru, 31 Desember 2024

Pt. KEPALA BADAN,

J. H. UMAR S., SKM. M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196910071994021004